

SASTRA

DAN

PERKEMBANGAN MEDIA



TIM EDITOR :

NOVI ANOEGRAJEKTI

HERU SP SAPUTRA

TITIK MASLIKATIN

SUDARTOMO MACARYUS



SASTRA
DAN
PERKEMBANGAN MEDIA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 1:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9:

1. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. Pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan.

Ketentuan Pidana

Pasal 113:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

SASTRA DAN PERKEMBANGAN MEDIA

TIM EDITOR :

NOVI ANOEGRAJEKTI
HERU S.P. SAPUTRA
TITIK MASLIKATIN
SUDARTOMO MACARYUS



PENERBIT OMBAK
www.penerbitombak.com

2018

SASTRA DAN PERKEMBANGAN MEDIA

Copyright© Novi Anoegrajekti, dkk. 2018

Diterbitkan oleh Himpunan Sarjana Kesusasteraan Indonesia (HISKI)

Komisariat Jember dan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember

bekerja sama dengan Penerbit Ombak, Desember 2018

Perumahan Nogotirto III, Jl. Progo B-15, Yogyakarta 55599

Tlp. 085105019945; Fax. (0274) 620606

e-mail: redaksiombak@yahoo. co. id

facebook: Penerbit OmbakTiga

www. penerbitombak. com

PO. 813. 12. '18

Editor: Novi Anoegrajekti, Heru S.P. Saputra, Titik Maslikatin, Sudartomo Macaryus

Tata letak: Aditya Pradana

Sampul: Tim Ombak dan Muhammad Zamroni

Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

SASTRA DAN PERKEMBANGAN MEDIA

Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2018

xvi+911 hlm.; 16 x 24 cm

ISBN: 978-602-258-507-7

DAFTAR ISI

Pengantar Editor ~ viii

Kata Pengantar Ketua Hiski Pusat ~ xi

Kata Pengantar Dekan FIB Universitas Jember ~ xiii

WACANA UTAMA

Prof. Dr. I.B. Putera Manuaba, M.Hum. ~ 3

Dr. Aprinus Salam, M.Hum. ~ 13

Prof. Dr. Djoko Saryono, M. Pd. dan Dr. Endah Imawati ~ 27

WACANA 1: SASRA DAN MEDIA SOSIAL

1. Novi Anoejrajekti, Sunarti Mustamar, Sri Mariati ,
Sudartomo Macaryus ~ 43
2. Sukarno ~ 59
3. Romdhi Fatkhur Rozi ~ 76
4. Anicleta Yuliasuti dan Rommel Utungga Pasopati ~ 86
5. Muta'allim ~ 98
6. Agung Nurdianto ~ 112
7. R. Nidhom Muhamad ~ 127
8. Qurrotu Ayunin ~ 141
9. M. Minladun Hakim ~ 153
10. Ans Prawati Yuliantari ~ 164
11. Kholidatul Imaniyah ~ 157

WACANA 2: SASRA DAN INDUSTRI KREATIF

1. Heru S.P. Saputra, Edy Hariyadi, Titik Maslikatin ~ 189
2. Bambang Aris Kartika ~ 200
3. Endang Waryanti dan Dini Novi Cahyati ~ 215
4. Umilia Rokhani ~ 228
5. Ika Febriani ~ 237
6. Zahratul Umniyyah ~ 252
7. Ifa Lathifah ~ 266
8. Yunita Anggraini ~ 273
9. Nailatul Iffah ~ 285
10. Imro'atus Sholiha ~ 296

11. Mohammad Erlangga ~ 307
12. Antariksawan Jusuf ~ 318
13. Eko Sri Israhayu ~ 327
14. Ali Imron Al-Ma'ruf dan Farida Nugrahani ~ 339
15. Sarjina Zamzanah ~ 350
16. Titik Maslikatin, Novi Anoegrajekti, Heru S.P. Saputra, Sri Mariati, Sunarti Mustamar, Asri Sundari, Christanto Puji Raharjo, Zahratul Umniyyah, Dewi Angelina ~ 364

WACANA 3: KELISANAN SEKUNDER, KOMIK, DAN SASTRA PERJALANAN

1. Sudartomo Macaryus, Novi Anoegrajekti, Yanuar Nurdiansyah ~ 381
2. Basuki Sarwo Edi ~ 391
3. Muji ~ 406
4. Sukatman ~ 414
5. Andy Suryadi, Tsabit Azinar Ahmad, Nyenyep Dwi Prastowo ~ 433
6. Agus Purwati Ningsih ~ 446
7. Didik Hariyono ~ 459
8. Sulistiyowati ~ 466
9. Siti Jamilatul Maliha ~ 475
10. Noviarini Indah Astuti ~ 493
11. Achmad Naufal Irsyadi ~ 502
12. Wiwien Widyawati Rahayu ~ 514
13. Putut Handoko, dan Cahyaningsih Pujimahanani ~ 522
14. Nur Fauzan Ahmad ~ 533
15. Tantrie Leonita ~ 547
16. Hat Pujiati, Irana Astutiningsih, Eko Suwargono ~ 559

WACANA 4: BAHASA, BUDAYA, DAN PENDIDIKAN BERBASIS MEDIA

1. Kusnadi ~ 577
2. Bambang Wibisono ~ 594
3. Mutmainnah dan Iqbal Nurul Azhar ~ 610
4. Sainul Hermawan ~ 623
5. Asrumi ~ 631
6. Retno Winarni, Nurhadi Sasmita, Sunarlan, Mrs. Ratna Endang Widuatie, Tri Chandra Aprianto ~ 643
7. Latifatul Izzah, Suharto, Neneng Afiah ~ 657
8. Akhmad Sofyan, Panakajaya Hidayatullah, Ali Badrudin ~ 669
9. Mei Artanto, Panakajaya Hidayatullah, Sigit Setiawan ~ 689
10. Sukapti ~ 698

11. Asri Sundari ~ 710
12. Didik Suharijadi, A. Erna Rochiyati S., Budi Suyanto ~ 723
13. Endang Komsatun dan Mochammad Darwis ~ 733
14. Ilzam Mahfudurido ~ 749
15. Abdul Wahid ~ 762
16. Selamat Supriyadi ~ 777
17. Chrisdianto Wibowo Kamandoko ~ 789
18. Pipiet Palestin Amurwani ~ 800
19. Alivia Davy Ratu Pericha ~ 808
20. Mainike Silvi Rety Badian ~ 824
21. Tri Iriani dan Mochammad Darwis ~ 837
22. Agustina Dewi S., Akhmad Sofyan, Dewi Angelina ~ 850
23. Ekna Satriyati ~ 861
24. Soekma Yeni Astuti dan Selly Kurniawan ~ 872
25. Bayu Mitra A. Kusuma dan Theresia Octastefani ~ 890

INDEKS ~ 900

MELAWAN ASIMILASI BUDAYA: BAHASA MELAYU SEBAGAI BASIS PERLAWANAN SOSIAL DAN POLITIK IDENTITAS DI THAILAND SELATAN

Bayu Mitra A. Kusuma dan Theresia Octastefani
Institute of Southeast Asian Islam (ISAI)
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Center for Southeast Asian Social Studies (CESASS)
Universitas Gadjah Mada
bayu.kusuma@uin-suka.ac.id
theresiaoctastefani@ugm.ac.id

Abstrak

Thailand adalah sebuah negara monarki di Mainland Asia berpenduduk mayoritas etnis Thai beragama Budha dan sebagian kecil etnis Melayu beragama Islam. Pada umumnya, Melayu Muslim di Thailand tinggal di wilayah selatan atau eks Kesultanan Patani Raya. Sebagai kelompok minoritas, Melayu Muslim di Thailand dalam catatan sejarahnya kerap mendapatkan diskriminasi di berbagai aspek. Salah satu bentuk diskriminasi terberat adalah kebijakan asimilasi budaya yang diterapkan secara paksa sejak rezim Jenderal Phibul Songkhram, dimana dalam kebijakan tersebut Thai Budha ditetapkan sebagai budaya dan identitas tunggal. Kebijakan tersebut membawa konsekwensi berupa larangan penggunaan nama, bahasa, dan identitas Melayu lainnya. Bahkan Bahasa Melayu dilarang digunakan terutama di sektor formal seperti bahasa pengantar sekolah dan instansi pemerintah. Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat Melayu Muslim melakukan perlawanan sosial yang kemudian direspon secara represif oleh pemerintah hingga menimbulkan konflik berkepanjangan. Situasi tersebut tak berubah hingga rezim Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang juga mengeluarkan statement menyudutkan penggunaan bahasa Melayu. Dalam konflik tersebut, Melayu Muslim bukan hanya menggunakan bahasa sebagai sarana perlawanan sosial, namun juga sebagai simbol politik identitas untuk menunjukkan eksistensi bahwa mereka tetap mampu bertahan di tengah berbagai tekanan.

Kata kunci: asimilasi budaya, bahasa melayu, perlawanan sosial, politik identitas

A. PENDAHULUAN

Thailand adalah sebuah negara berbentuk monarki yang secara geografis terletak di antara benua Australia dan daratan *mainland* Asia. Kondisi geografis tersebut membuat posisi Thailand menjadi strategis dan mudah dijangkau untuk kegiatan perdagangan maupun penyebaran agama di masa lampau. Mayoritas penduduk Thailand beragama Budha aliran Theravada. Sedangkan sebagian kecil lainnya memeluk agama Islam dan Konghucu. Meskipun Islam di Thailand merupakan agama minoritas yang populasinya kurang dari lima persen penduduk, namun Islam di Thailand merupakan minoritas yang berkembang cepat (Aphornsuvan, 2003:3). Populasi Muslim Melayu di Thailand mayoritas berada di wilayah selatan meliputi Provinsi Pattani, Yala dan Narathiwat ditambah dengan sebagian Satun dan Songkhla. Atau dengan kata lain mereka umumnya tinggal di wilayah eks Kesultanan Patani Raya yang pernah berdaulat sebelum dianeksasi oleh Kerajaan Siam. Wilayah tersebut di era modern berbatasan langsung dengan negara Malaysia.

Relasi mayoritas dan minoritas di berbagai belahan dunia sangatlah dinamis sekaligus rentan terhadap munculnya konflik, tak terkecuali pada kehidupan masyarakat Muslim. Di Timur Tengah misalnya, pada masa awal Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, Muslim sebagai kelompok minoritas yang mendapatkan perlakuan represif di kota Makkah memutuskan hijrah ke Abyssinia dan Madinah (Siddiqi, 2006). Adapun di Asia Tenggara, kawasan Thailand Selatan yang menjadi basis masyarakat Melayu Muslim juga merupakan sebuah daerah rawan konflik dengan latar belakang gesekan budaya. Apalagi Thailand beberapa kali dipimpin oleh rezim perdana menteri yang sangat diskriminatif terhadap masyarakat Melayu Muslim, meskipun sebenarnya harus diakui juga bahwa Thailand memiliki raja yang dipandang bijaksana seperti Bhumibol Adulyadej yang dua tahun lalu mangkat. Namun perlu diingat bahwa dalam sistem monarki konstitusional atau monarki yang tidak absolut, raja adalah seorang kepala negara yang berfungsi sebagai simbol, sedangkan kepala pemerintahan adalah perdana menteri.

Salah satu rezim perdana menteri yang paling diskriminatif bahkan represif adalah rezim Jenderal Phibul Songkhram dimana masyarakat Melayu Muslim dipaksa menjalankan kebijakan asimilasi budaya (Mahmud, 2004:2). Dalam kebijakan asimilasi tersebut Melayu Muslim dipaksa untuk menanggalkan identitas mereka dan mengganti dengan segala bentuk identitas bercorak Thai. Salah satu dampak yang paling mencolok dari kebijakan asimilasi budaya sang jenderal adalah Bahasa Melayu yang merupakan bahasa ibu dari masyarakat setempat dilarang untuk digunakan, terutama dalam hal-hal yang sifatnya formal seperti bahasa pengantar pelajaran di sekolah dan dalam sistem administrasi pemerintahan. Dilarang menggunakan bahasa ibu yang telah

digunakan secara turun temurun secara sepihak dan mendadak, masyarakat Melayu Muslim pun kemudian melakukan perlawanan untuk membela etnisnya yang dirugikan.

Berdasarkan kronologi peristiwa di atas dapat dilihat bahwa dalam perjalanan sejarahnya Bahasa Melayu telah menjadi basis perlawanan sosial dan sarana memperkuat politik identitas masyarakat lokal. Karena itu menjadi menarik untuk menelisik secara lebih detail tentang bagaimanakah masyarakat Melayu Muslim minoritas di Thailand Selatan melawan kebijakan asimilasi budaya yang diterapkan oleh rezim penguasa. Serta kemudian bagaimanakah bentuk perlawanan sosial dan politik identitas yang mereka lakukan untuk mempertahankan budaya mereka seperti penggunaan Bahasa melayu dalam berbagai aktivitas sehari-hari.

Terkait kajian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang layak menjadi rujukan. *Pertama*, penelitian Phaosan Jehwae (2014) dari Fatoni University yang menyatakan bahwa dasar pendidikan menurut konstitusi Kerajaan Thailand tidak memperbolehkan penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa resmi dan bahasa pengantar dalam semua mata pelajaran. Bahasa Melayu hanya sedikit diangkat penggunaannya dalam konteks kepentingan politik Kerajaan Thailand, sebagai bagian dari upaya menjaga kestabilan politik di Thailand Selatan. *Kedua*, penelitian dari Suwilai Premsrirat (2008) dari Mahidol University yang memberikan pernyataan bahwa banyak ketakutan terjadi di Thailand selatan bahwa pendidikan umum akan digunakan untuk menghancurkan bahasa lokal dan identitas agama. Salah satu strategi agar ketakutan tersebut tidak muncul berlebihan adalah dengan mengupayakan adanya program bilingual atau dual bahasa. Namun itupun baru sebatas digunakan di tingkat lokal, tidak untuk diangkat ke tingkat nasional. *Ketiga*, penelitian yang merupakan tesis doctoral dari Norizah Binti Ardi (2005) di Universiti Malaya yang mengemukakan bahwa Bahasa Thai digunakan sebagai bahasa resmi dan bahasa kenegaraan, sedangkan Bahasa Melayu hanya digunakan secara terbatas dalam lingkup kekeluargaan dan keagamaan saja. Adapun *positioning* kajian ini terhadap beberapa penelitian terdahulu tersebut adalah mencoba untuk mengungkap aspek yang belum banyak diungkap, yaitu penggunaan Bahasa Melayu sebagai basis perlawanan sosial dan politik identitas.

B. MUSLIM DI THAILAND: ANTARA DUA KELOMPOK BESAR

Secara umum Islam memang merupakan agama mayoritas di Asia Tenggara dengan kantong utama berada di wilayah kepulauan seperti Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Akan tetapi sebaliknya, Islam adalah agama minoritas di *mainland* Asia yang telah dihuni oleh penganut

Hindu dan Budha jauh sebelum Islam datang sekitar abad ke-9 (Aphornsuvan, 2003:7). Sebagaimana telah disebutkan di bagian awal kajian ini bahwasanya Muslim Melayu di Thailand mayoritas hidup di wilayah selatan terutama Provinsi Pattani sebagai kantong utama. Bahkan di Provinsi Pattani saja, populasi Muslim mencakup 80% dari keseluruhan Muslim di seluruh wilayah Thailand (Kusuma dan Octastefani, 2016:34).

Dalam perkembangan kehidupannya, masyarakat Muslim di Thailand dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu golongan yang terasimilasi (*assimilated group*) dan golongan yang tidak terasimilasi (*unassimilated group*). *Assimilated group* adalah golongan yang terasimilasi atau berbaur dengan kaum mayoritas yaitu masyarakat Thai Budha dalam berbagai bidang tatanan kehidupan kecuali masalah keagamaan. Mereka berdiaspora ke berbagai wilayah Thailand secara dinamis. Sedangkan *unassimilated group* adalah golongan masyarakat Muslim yang tidak berbaur dengan Thai Budha. Mereka hanya bergaul dengan komunitasnya sendiri di Thailand Selatan dengan alasan mereka harus menjaga kultur Melayu Islam pada berbagai aspek seperti nama, bahasa, dan adat istiadat. Mereka berpikir bahwa pergaulan dengan komunitas lain dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap eksistensi budaya asli mereka.

Alasan dari kondisi tersebut dapat dilacak secara historis. Namun sebelumnya kita perlu memahami terlebih dahulu perbedaan antara Pattani dan Patani. Pattani (dengan dua huruf t) berarti sebagai sebuah provinsi di negara Thailand modern, sedangkan Patani (dengan satu huruf t) berarti sebuah kesultanan berdaulat sebelum dianeksasi oleh Kerajaan Siam. Pada saat itu Kerajaan Siam terus menerus berusaha menguasai Patani dengan agresi namun selalu gagal. Sampai pada pemerintahan Sultan Muzhaffar, Kesultanan Patani menuju zaman keemasannya sehingga semakin menarik Siam untuk kembali menyerang dan akhirnya dapat menguasainya setelah perang bertahun-tahun (Alwi, 2011:139-140). Kerajaan Siam memiliki ambisi besar untuk menganeksasi wilayah Kesultanan Patani karena merupakan daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah sekaligus strategis sebagai bandar perniagaan, bahkan hingga saat ini pun kita masih bisa melihat sisa-sisa kebesaran Patani sebagai pelabuhan yang ramai. Dari aneksasi inilah awal mula benturan yang melibatkan kelompok etnis Melayu Muslim dengan kebijakan represif rezim penguasa Thailand dimana benturan tersebut masih terjadi sampai saat ini berupa darurat militer.

C. REZIM PHIBUL SONGKHRAM DAN THAKSIN SHINAWATRA

Kebijakan asimilasi budaya di Thailand mulai diberlakukan pada saat Jenderal Phibul Songkhram menjabat sebagai perdana menteri dalam kurun waktu 1938-1944 dan 1947-1957. Kebijakan paling chauvinistik oleh Songkhram dijalankan pada termin pertama kekuasaan pemerintahannya, saat dia mengubah nama Kerajaan Siam menjadi Kerajaan Thai (Suaedy, 2018:117). Kebijakan asimilasi budaya ini dipandang oleh Songkhram sebagai kebijakan nasionalisasi budaya Thailand dan menjadi kebijakan primer negara. Songkhram berpandangan bahwa nasionalisme harus diciptakan dari kesamaan yang tunggal dan meniadakan perbedaan. Dalam kebijakan asimilasi budaya ala Songkhram, Bahasa Thai menjadi elemen penting yang diasimilasikan ke seluruh penjuru Thailand, termasuk di wilayah selatan yang kemudian menciptakan resistensi dari masyarakat Melayu Muslim yang berbahasa Melayu sebagai alat komunikasi sehari-harinya (Kusuma, 2015:11).

Pelarangan penggunaan Bahasa Melayu di sektor formal mengakibatkan banyak Melayu Muslim yang gagal masuk sekolah negeri untuk mengakses pendidikan. Kalaupun ada yang berhasil masuk, di dalam sekolah pun masyarakat Melayu Muslim dilarang menggunakan bahasa Melayu dalam percakapan sehari-hari di luar jam pelajaran sekalipun. Hal yang sama juga terjadi bila seorang Melayu Muslim ingin masuk ke dalam birokrasi pemerintahan negara. Bukan hanya bahasa yang harus berubah, nama pun bahkan harus disesuaikan dengan menginternalisasikan unsur Thai, mirip dengan kebijakan terhadap etnis Tionghoa pada masa Orde Baru Soeharto di Indonesia. Kebijakan Songkhram tersebut didukung oleh sistem politik di Thailand yang absolut. Sistem tersebut dalam pemerintahan Thailand disebut dengan “politik birokrasi” dimana rezim penguasa memiliki hak untuk mengontrol seluruh aspek kehidupan Melayu Muslim secara ketat. Namun kebijakan tersebut tak lantas membuat masyarakat lokal menurut begitu saja. Justru Bahasa Melayu menjadi simbol perlawanan sosial yang menolak tunduk pada kebijakan sepihak rezim penguasa. Perlawanan sosial tersebut, baik yang berupa perlawanan bersenjata maupun perundingan, terus berlangsung hingga saat ini.

Rezim perdana menteri Thailand lainnya yang juga sangat diskriminatif terhadap Melayu Muslim adalah Thaksin Shinawatra. Seorang konglomerat media telekomunikasi yang kemudian berhasil menduduki jabatan sebagai perdana menteri pada tahun 2001 sampai 2006 sebelum digulingkan oleh kudeta militer. Meskipun pada faktanya Shinawatra berjasa dalam pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah selatan Thailand, namun fakta tersebut ternoda oleh tindakannya

sendiri. Shinawatra mencetuskan dua statemen kontroversial bahwa: *pertama*, orang Thailand adalah mereka yang beragama Budha. *Kedua*, walaupun tidak beragama Budha mereka harus menggunakan bahasa Thai. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurutnya apabila seseorang memeluk agama Islam, orang tersebut baru bisa disebut orang Thai hanya jika menggunakan bahasa Thai dalam kesehariannya. Sedangkan apabila seseorang beragama Budha, menggunakan bahasa apapun tetaplah dianggap sebagai orang Thai. Dengan demikian jelas bahwa mereka yang beragama Islam dan menggunakan Bahasa Melayu dalam kesehariannya akan menjadi warga negara yang tersisih. Di bawah rezim Shinawatra pula darurat militer kembali diberlakukan di wilayah selatan meliputi tiga provinsi dengan mayoritas Muslim dan belum dicabut hingga saat ini.

D. BAHASA MELAYU SEBAGAI BASIS PERLAWANAN

Bahasa merupakan salah satu unsur yang menunjukkan sebuah identitas jati diri seseorang atau sekelompok orang agar orang lain dapat mengenalnya dengan mudah. Bahasa juga memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, dimana bahasa membantu seseorang membentuk struktur dasar persepsi yang digunakan untuk berkomunikasi dan berinteraksi sehari-hari. Sejak dahulu, masyarakat Muslim di Thailand Selatan mempunyai satu bahasa yang menjadi identitas mereka yaitu bahasa Melayu Patani – atau oleh sebagian masyarakat lokal disebut Bahasa Jawi (perpaduan Arab-Melayu) – yang memiliki beberapa perbedaan dialek sesuai dengan lokasi masing-masing.

Rezim penguasa Thailand selalu menggunakan alasan nasionalisme versi mereka dalam menjalankan kebijakan asimilasi budaya dengan berbagai cara. Namun masyarakat Muslim Melayu juga memiliki berbagai cara untuk melakukan perlawanan sosial dalam rangka mempertahankan eksistensi Bahasa Melayu. Mereka memiliki jargon “hilang bahasa hilanglah bangsa”. Salah satu contoh adalah eksistensi Majalah Azan, sebuah majalah berbahasa Melayu dengan tulisan aksara Jawi sebagai bahasa pengantarnya. Majalah ini mewarnai kehidupan sosial Melayu Muslim di Thailand Selatan sejak tahun 1975. Terbitnya majalah tersebut berkat sekumpulan jurnalis dan intelektual Melayu yang memiliki kesadaran cinta akan bahasanya. Mereka mengumpulkan berbagai artikel dan kemudian mencetaknya untuk dipasarkan dengan target penjualan masyarakat Melayu Muslim. Meskipun harus diakui bahwa *editing* dan *layout* dari Majalah Azan ini secara kualitas masih belum sempurna dan tertinggal cukup jauh dari media cetak lainnya di Thailand. Namun setidaknya keberadaan dari majalah ini mampu menunjukkan bahwa masyarakat Melayu Muslim mampu memberikan perlawanan sebagai kontra narasi dari kampanye nasionalisme versi rezim penguasa.

Majalah ini banyak membahas tentang pemikiran-pemikiran sosial maupun spiritual oleh para intelektual Melayu Muslim terkait perlawanan terhadap upaya pemerintah menghapus Bahasa Melayu di dunia pendidikan baik di sekolah negeri maupun sekolah keagamaan Islam untuk diganti dengan Bahasa Thai dengan tujuan menghasilkan generasi penerus masa depan yang berkomunikasi dengan Bahasa Thai sebagai identitas nasional. Perlawanan masyarakat Melayu Muslim terhadap kebijakan rezim penguasa merupakan bagian dari upaya menyelamatkan identitas etnisitas sekaligus religiusitas mereka. Mereka khawatir masuknya kurikulum Thai ke dalam sistem pendidikan agama Islam akan mengakibatkan historitas Melayu Muslim terlupakan di dalam masyarakatnya sendiri (Feigenblatt, 2010:57). Dominasi Bahasa Thai dan dihilangkannya Bahasa Melayu akan membuat etnis ini krisis identitas di masa depan. Oleh karena itu keberadaan Majalah Azan menjadi sangat bermakna. Persebaran majalah ini berguna untuk menyampaikan pemikiran para intelektual kepada masyarakat secara luas. Dengan demikian diharapkan kesadaran untuk mempertahankan eksistensi Bahasa Melayu dapat dimiliki oleh seluruh masyarakat Muslim Melayu sehingga kekuatan perlawanan sosial menjadi semakin besar.

Konflik di Thailand Selatan ini selain berbicara tentang perlawanan sosial juga erat kaitannya dengan politik identitas, dimana terjadi benturan pengaruh antar kelompok disebabkan kebijakan diskriminatif yang menimbulkan kekerasan dan konflik etnis (Kusuma, 2017:44). Atau dengan bahasa yang lebih mudah, politik identitas selalu terkait dengan rasisme, bio-feminis dan lingkungan (Heller dalam Abdillah, 2002:22). Terbukti dengan munculnya kelompok-kelompok yang ingin membawa Pattani menjadi negara merdeka terpisah dari Kerajaan Thailand seperti Barisan Revolusi Nasional (BRN) dan Patani United Liberation Organization (PULO). Meskipun masih perlu diperjelas kembali adalah apakah organisasi-organisasi itu benar-benar ingin memisahkan diri secara politik, atau apakah mereka hanya menggunakan isu pemisahan negara supaya memicu rakyat kecil untuk bangkit dengan memakai senjata, padahal tujuan asli organisasi hanya untuk mendapatkan keuntungan dalam bernegosiasi (Aeusrivongse, 2005).

Apa yang terjadi terhadap minoritas Melayu Muslim di Thailand dapat dikatakan sebagai kekerasan kultural. Kekerasan kultural yang dimaksud adalah aspek budaya, ranah simbolik eksistensi kita – ditunjukkan oleh agama dan ideologi, bahasa dan seni, ilmu pengetahuan yang bersifat empirik dan ilmu pengetahuan yang bersifat formal – yang dapat digunakan untuk menjustifikasi atau melegitimasi kekerasan langsung atau struktural (Galtung, 2003:429). Perubahan sosial dan lingkungan akibat kebijakan asimilasi budaya berdampak buruk terhadap kehidupan Melayu Muslim. Bahkan dapat

dikatakan bahwa kebijakan asimilasi budaya adalah suatu bentuk perang psikologis untuk melemahkan moral spirit masyarakat Melayu Muslim dalam mempertahankan eksistensi budayanya.

Namun dibalik semua fakta tersebut, ada sebuah berita menggembirakan, belakangan ini muncul upaya-upaya yang bagus dari sejumlah kalangan pemuda dan mahasiswa Melayu Muslim Thailand. Mereka nampak gusar dan lelah dengan konflik berkepanjangan yang telah berlangsung sangat lama. Para mahasiswa yang aktif menggelar pertemuan untuk membahas masalah-masalah kebangsaan itu mendesak kedua belah pihak untuk segera bertemu dalam satu meja dan menciptakan kesepakatan perdamaian permanen yang dapat diterima kedua belah pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat Melayu Muslim. Hasilnya, walaupun masih dalam keadaan terdesak, Bahasa Melayu di Thailand Selatan terus bertahan dan menampakkan masa depan yang sedikit cerah. Sebagai contoh, Bahasa Melayu juga mendapat tempat di beberapa universitas di Thailand. Tentu kita semua berharap solusi damai dapat segera terwujud agar tidak ada lagi diskriminasi terhadap Melayu Muslim di Thailand Selatan dan Bahasa Melayu terus eksis sebagai khazanah kekayaan bahasa di Thailand khususnya dan Asia Tenggara pada umumnya.

E. SIMPULAN

Bahasa adalah salah satu unsur penting untuk menunjukkan sebuah identitas atau jati diri. Seperti masyarakat Muslim di Thailand Selatan yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai identitas etnisnya. Namun eksistensi bahasa tersebut terancam seiring munculnya kebijakan asimilasi budaya yang mulai diberlakukan sejak rezim Jenderal Phibul Songkhram. Sang jenderal berpandangan bahwa nasionalisme harus diciptakan dari kesamaan yang tunggal. Dalam kebijakan tersebut, Bahasa Thai menjadi elemen penting yang diasimilasikan termasuk di wilayah selatan hingga menciptakan resistensi. Rezim lainnya yang juga sangat diskriminatif adalah Thaksin Shinawatra dimana dia mencetuskan statemen kontroversial yang secara tidak langsung menyatakan bahwa mereka yang beragama Islam dan menggunakan Bahasa Melayu dalam kesehariannya menjadi warga negara yang tersisih.

Rezim penguasa selalu menggunakan nasionalisme versi mereka sebagai alasan dalam menjalankan kebijakan asimilasi budaya. Masyarakat Melayu Muslim pun melawan dengan berbagai cara untuk mempertahankan eksistensi bahasa ibu mereka seperti melalui penerbitan Majalah Azan, sebuah majalah berbahasa Melayu dengan tulisan aksara Jawi. Meskipun kualitas *editing* dan *layout* dari majalah ini tertinggal cukup jauh dari media cetak lainnya di Thailand, namun keberadaan majalah ini mampu menunjukkan bahwa masyarakat Melayu Muslim mampu melawan sebagai kontra narasi dari

kampanye nasionalisme versi rezim penguasa. Hal ini agar masyarakat Melayu Muslim memiliki kesadaran bersama untuk mempertahankan eksistensi bahasanya. Selain tentang perlawanan sosial, masalah ini juga erat kaitannya dengan politik identitas yang dibuktikan dengan munculnya kelompok-kelompok yang ingin membawa Pattani menjadi negara merdeka seperti BRN dan PULO. Namun perlu diperjelas kembali motif mereka untuk memisahkan diri secara politik, antara mempertahankan identitas Melayu atau sebatas mencari keuntungan dari proses negosiasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Ubed. 2002. *Politik Identitas Etnis*. Magelang: Indonesia Tera.
- Aeusrivongse, Nidhi. 2005. "Pemahaman terhadap Situasi di Thailand Selatan Melalui Perspektif Pemberontakan Seributahunan." Dalam *Kyoto Review of Southeast Asia Issue 6*.
- Alwi, Al-Habib. 2001. *Sejarah Masuknya Islam di Timur Jauh*. Jakarta: Lentera Basritama.
- Aphornsuvan, Thanet. 2003. *History and Politics of the Muslim in Thailand*. Bangkok: Thammasat University.
- Ardi, Norizah Binti. 2005. "Sikap Terhadap Bahasa Melayu dan Penggunaannya di Kalangan Pelajar Universiti di Selatan Thailand." *Tesis Doktorat*, Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
- Feigenblatt, Otto von. 2010. "The Muslim Malay Community in Southern Thailand: A Small People Facing Existential Uncertainty." *Ritsumeikan Journal of Asia Pacific Studies Vol. 27*.
- Galtung, Johan. 2003. *Studi Perdamaian: Perdamaian dan Konflik, Pembangunan dan Peradaban*. Surabaya: Pustaka Eureka.
- Jehwae, Phaosan. 2014. "Dilema Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Pengantar Pembelajaran di Pondok Pesantren Patani Thailand Selatan." Dalam *Ta'dib: Journal of Islamic Education Vol. XIX No. 2*.
- Kusuma, Bayu Mitra A. 2017. "Islam, Asymmetric Policy, and Social Conflicts: The State's Role as a Root of Radicalism in the Philippines and Thailand." Dalam *IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies Vol. 1 No. 1*.
- Kusuma, Bayu Mitra A. dan Octastefani, Theresia. 2016. "Patani United Liberation Organization: From Jihad to Local Politics Movement." Dalam *The Indonesian Journal of Public Administration Vol. 2 No. 1*.
- Kusuma, Bayu Mitra A. 2015. "Dialectics of Islam, Politics and Government in

Southeast Asian Countries: A Comparison of Indonesia and Thailand”, dipresentasikan di 6th *Graduate School of UIN Sunan Kalijaga and Georg August Universitat Gottingen Joint International Conference on Islamic Studies Revisited*, Yogyakarta, 27-30 Oktober.

Mahmud, Nik Anuar Nik. 2004. *Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1885-1954*, Negeri Sembilan: Saremban.

Premisrat, Suwilai. 2008. “Language for National Reconciliation: Southern Thailand”, dalam *Enabling Education Network Issue 12*.

Siddiqi, M. Yasin Mazhar. 2006. *The Prophet Muhammad SAW: A Role Model for Muslim Minorities*, Leicestershire: The Islamic Foundation.

Suaedy, Ahmad. 2018. *Islam, Minorities, and Identity in Southeast Asia*. Depok: Inklusif Cideq dan ISAI UIN Sunan Kalijaga.

INDEKS

INDEKS NAMA PENULIS

A

Afiah, Neneng 657
Ahmad, Nur Fauzan 533
Ahmad, Tsabit Azinar 433
Al-Ma'ruf, Ali Imron 299, 339, 349
Amurwani, Pipiet Palestin 800
Angelina, Dewi S. 364, 850
Anggraini, Yunita 273
Anoeграjekti, Novi 43, 193, 194, 199,
364, 381
Artanto, Mei 689
Asrumi 631
Astuti, Noviarini Indah 493
Astuti, Soekma Yeni 872
Astutiningsih, Irana 559
Ayunin, Qurrotu 141
Azhar, Iqbal Nurul 610

B

Badian, Mainike Silvi Rety 824
Badrudin, Ali 669

C

Cahyati, Dini Novi 215

D

Darwis, Mochammad 733, 837

E

Edi, Basuki Sarwo 391
Erlangga, Mohammad 307

F

Febriani, Ika 237

H

Hakim, M. Minladun 153
Handoko, Putut 522, 531
Hariyadi, Edy 189
Hariyono, Didik 459
Hariyono, Didik 459
Hat Pujiati 559
Hermawan, Sainul 623
Hidayatullah, Panakajaya 669, 689

I

Iffah, Nailatul 285
Imaniyah, Khilidatul 175
Iriani, Tri 837
Irsyadi, Achmad Naufal 502
Israhayu, Eko Sri 327
Izzah, Latifatul 657
Jusuf, Antariksawan 318, 324

K

Kamandoko, Chrisdianto Wibowo 789
Kartika, Bambang Aris 200
Komsatun, Endang 733
Kurniawan, Selly 872
Kusnadi 219, 225, 577
Kusuma, Bayu Mitra A. 890
Lathifah, Ifa 266
Leonita, Tantrie 547

M

Macaryus, Sudartomo 43, 193, 194, 199,
381, 431
Mahfudurido, Ilzam 749
Maliha, Siti Jamilatul 475
Mariati, Sri 43, 364
Maslikatin, Titik 189, 364
Muhamad, R. Nidhom 127
Muji 406
Mustamar, Sunarti 43, 364
Muta'allim 98
Mutmainnah 610

N

Ningsih, Agus Purwati 446
Nugrahani, Farida 339
Nurdianto, Agung 112
Octastefani, Theresia 890

P

Pasopati, Rommel Utungga 86
Pericha, Alivia Davy Ratu 808
Pujimahanani, Cahyaningsih 522

SASTRA DAN PERKEMBANGAN MEDIA

Perkembangan masyarakat dan kebudayaan, telah menyebabkan adanya evolusi media sastra. Kemajuan teknologi komunikasi, berpengaruh terhadap penciptaan sastra, karena sastra pun kemudian menggunakan kemajuan teknologi itu. Dalam evolusi dan/ atau revolusi kebudayaan itu, ciptaan media baru berdampak mengurangi penggunaan media lama, namun media-media lama ternyata masih tumbuh secara simultan di tengah kemajuan-kemajuan media mutakhir (multi-media). Di tengah media sastra *cyber*, masih ada media sastra lisan, media sastra buku, dan media sastra jurnalistik.

Ibarat lampu lilin atau teplok yang tidak bisa digantikan oleh listrik. Sastra dengan perkembangan media yang ada, memiliki pendukung atau penggemar sendiri-sendiri. Dengan demikian, semua media sastra dapat tumbuh berdampingan, tanpa saling menafikan satu sama lain
(Prof. Dr. I.B. Putera Manuaba, M.Hum.).



FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS JEMBER



ISBN 602-258-507-4

